

## From The Editors

The rising interest in reevaluating the various aspects of the Indonesian revolutionary war for independence between 1945-1949 has opened up the opportunity for the History Department at UGM to be involved in research and to contribute to the growing polemic in society. Yet interest during this period came not for the people nor government of Indonesia who tend to view the revolutionary history as sacred and should not be tampered with, instead it came from Dutch society and pushed by the discussion on the question of state compensation toward victims of state crime and violence perpetrated toward Indonesian during the period. The discussion is also connected to a deeper moral discussion of Dutch historical atrocities that was possible because the opposition from veteran groups of the colonial and Dutch army has been reduced as a result of the passing of this old generation. The lack of emotional and moral engagement from Indonesian society is an interesting fact. This discussion provided a chance to put the voice of the Indonesian society in their evaluation of the revolutionary period, yet this opportunity was met with silence. From the viewpoint of the government, the main reason not to engage with the discussion was based on the want to maintain the good and peaceful relationship between Indonesian and Dutch society and consider such looking back into history as unnecessary. But what about for Indonesian society? In this regard, society's reaction to this is something very interesting for historians to analyze. What aspects have made society's reaction so ambivalent and uneasy to the period? It shows that the period should not be seen merely as symbolically heroic and nationalistic, but also one which has aspects that were humiliating and traumatic. If this is true, then the need to conduct engagement with our revolutionary past becomes even more important – as part of the closure to bring about in the question of state-society relationship and the creation of a nationhood that is inclusive and not traumatic.

## Pengantar Redaksi

Tumbuhnya ketertarikan dalam menilai ulang beragam aspek periode revolusi kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945-1949 ini telah membuka kesempatan Departemen Sejarah UGM untuk terlibat dalam penelitian dan berkontribusi dalam polemik dalam masyarakat. Tetapi ketertarikan terhadap periode ini berasal bukan dari dalam masyarakat ataupun pemerintah Indonesia yang cenderung untuk menganggap bahwa narasi revolusi itu suci dan tidak perlu diutak-atik, melainkan dari masyarakat Belanda yang didorong oleh diskusi tentang kompensasi negara terhadap kejahatan dan kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia. Diskusi ini juga berkaitan dengan pendalaman diskusi kejahatan moral sejarah Belanda yang dimungkinkan karena oposisi veteran tentara kolonial dan tentara Belanda sudah mengecil akibat dari kematian generasi tua itu. Ketiadaan *engagement* emosional dan moral dari masyarakat Indonesia ini merupakan sesuatu yang menarik. Ini merupakan kesempatan untuk menempatkan suara masyarakat Indonesia terhadap penilaian periode revolusi, tetapi kesempatan ini disambut dengan kesunyian. Dari sudut pandang pemerintah, alasan utama untuk tidak menyambut gayung dari diskursus ini didorong oleh keinginan untuk mempertahankan perdamaian antara orang Indonesia dan Belanda dan menganggap bahwa masa lalu sebaiknya tidak diubek-ubek. Tetapi apa alasan masyarakat? Dalam hal ini, sebenarnya reaksi masyarakat ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dianalisis sejarawan. Yaitu aspek apa yang membuat reaksi masyarakat ambivalen dan ragu terhadap periode ini? Ini menunjukkan bahwa periode ini tidak hanya bisa dilihat sebagai periode penuh kepahlawanan dan nasionalisme, melainkan sebaliknya memiliki aspek-aspek yang memalukan dan traumatis. Jika benar hal demikian, maka kebutuhan untuk melakukan *engagement* dengan revolusi menjadi lebih penting – sebagai bagian dari penyelesaian hubungan negara dan bangsa dan konsep kebangsaan yang inklusif dan tidak traumatis.